



ABSTRAK

Wan Rizky Alfares (2018): Analisis Maqashid Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor. 568/Pdt.G/2015/PA.Pbr, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor. 0066/Pdt.G/2015/PTA.Pbr Dan Mahkamah Agung Nomor. 404 K/AG/2016 Tentang Pembatalan Perkawinan.

Pembatalan perkawinan merupakan akibat tidak dipenuhinya aturan-aturan, hukum-hukum yang mengatur tentang perkawinan. Terjadinya pembatalan perkawinan adalah karena aturan-aturan sebagaimana diatur dalam pasal 22-28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dilanggar.

Latar belakang penulis mengambil judul ini karena melihat adanya perbedaan pengambilan putusan oleh hakim di tiga tingkatan Peradilan dalam memproses satu kasus pembatalan perkawinan pada perkara yang sama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga Mahkamah Agung, yang berbeda dalam menetapkan putusan terhadap perkara pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Pekanbaru pada register perkara No. 568/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yakni putusan, bahan hukum sekunder berupa Kompilasi Hukum Islam dan kitab-kitab yang terkait, dan bahan hukum tersier berupa buku-buku yang menunjang peneletan penulis. Apabila dilihat dari sifat dan pendekatannya maka termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan. Analisa data yang digunakan adalah metode *Conten analisis*, yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dan Mahkamah Agung, terhadap perkara pembatalan perkawinan sudah sesuai dengan UU Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Adapun yang membuat perbedaan putusan oleh masing-masing tingkatan Peradilan tersebut ialah penerapan hukum Islam melalui pertimbangan maqashid syariah, yang mana konsep maqashid syariah ini bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, dan pada perkara ini, diambil sebuah kaedah yang artinya *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan* dengan maksud mencegah batalnya perkawinan pada perkara ini berarti telah mencegah kerusakan walaupun pada kasus perkara ini telah memenuhi syarat sebagaimana yang tertera pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 untuk dibatalkan. Dan pertimbangan ini juga telah tepat dan tidak melanggar hukum karena sesuai dengan pasal 184 HIR, dan Pasal 62 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman.